

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh :

NAMA : ANE SEPTIYANI
NOMOR INDUK : E. 1635222735
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh Ujian Sidang Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA)



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NEGARA (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2020

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
PADA JENJANG PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI 2 PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing:

Pembimbing I,

tec



H. Dedy Suryana, S.IP., M.M.
NIDN. 00-2408-5501

Pembimbing II,

*29/8-20
Ace.*



Dadang Suhendi, S.Sos., M.Si.
NIDK. 99-0401-6339

Mengertahui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang

Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-3012-7102

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG”**.

Proposal penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian proposal penelitian pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang. Dalam penulisan proposal penelitian ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Yuyun Hidayat, Drs selaku Ketua Yayasan Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, M.Pd selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanti, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak H. Dedy Suryana, S.IP., M.M selaku Pembimbing I.
7. Yth. Bapak Dadang Suhendi, S.Sos., M.M.Si selaku Pembimbing II.
8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

9. Yth. Seluruh staff TU Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
10. Yth. Ibu Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang yang telah memberikan ijin dan memberikan bantuan kepada penulis.
11. Yth, Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang yang telah bersedia menjadi informan untuk bahan penelitian.
12. Yth, Kaur Tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang yang telah bersedia menjadi informan untuk bahan penelitian.
13. Yth, Operator Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang yang telah bersedia menjadi informan untuk bahan penelitian.
14. Yth, Administrasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang yang telah bersedia menjadi informan untuk bahan penelitian.
15. Yth. Seluruh Pegawai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang yang telah membantu penulis.
16. Rekan – rekan Mahasiswa seperjuangan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Sumedang, 30 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA
JENJANG PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 2 PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

NAMA : ANE SEPTIYANI
NPM : E. 1635222735
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

148 halaman, 5 bab, 52 tabel, 3 gambar, 8 lampiran
Daftar pustaka: 9 Sumber dan 5 dokumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program indonesia pintar (PIP) pada jenjang pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) negeri 2 pamulihan kabupaten sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu *purposive sampling*. Dengan informan penelitian, yaitu Staff Administrasi Sekolah, Wakil Kepala Kesiswaan, Kurikulum dan Kesiswaan, dan Kaur TU dan Umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, prosedur pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi program indonesia pintar (PIP) pada jenjang pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) negeri 2 pamulihan kabupaten Sumedang belum terealisasi secara optimal mengingat masih terdapat hambatan diantaranya ketidak tepat sasaran program, minimnya sosialisasi, minimnya koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait, dan juga kurang cakupannya sumber daya manusia dalam hal ini panitia atau pegawai yang bertugas dalam program. Kemudian, terdapat beberapa upaya yang diharapkan dapat meminimalisir hambatan-hambatan tersebut dengan memberikan pemahaman yang tepat kepada sumber daya pegawai serta orang tua siswa melalui sosialisasi dan juga mengecek persyaratan penerima manfaat program dengan seksama.

Kata kunci: implementasi, program Indonesia pintar

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SMART INDONESIA PROGRAM (PIP) AT THE LEVEL OF EDUCATION IN PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOLS (SMP) 2 PAMULIHAN OF SUMEDANG REGENCY

Arranged by:

NAME : ANE SEPTIYANI
NPM : E. 1635222735
MAJORS : PUBLIC ADMINISTRATION

**148 pages, 5 chapters, 52 tables, 8 attachments
Bibliography: 9 source and 5 documents**

The purpose of this study was to determine the implementation of the smart indonesia program (PIP) at the level of education in public junior high schools (SMP) 2 Pamulihan of Sumedang Regency. The research method used in the study, namely purposive sampling. With the research informants, namely, Staff and Financial Administration, Deputy Head of Student Affairs, Staff Curriculum and Students, and last Head of Administrative and General Affairs. Data collection techniques used, namely literature studies and field studies consisting of observations, interviews, and documentation. Meanwhile, the data processing procedures in this study, namely data reduction, data display, and verification.

Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the smart indonesia program (PIP) at the level of education in public junior high schools (SMP) 2 Pamulihan of Sumedang Regency has not been implemented optimally considering there are still obstacle including the inaccuracy of program targets, lack of socialization, stakeholders dan related agencies, and also inadequate human resources, in this case the committe or staff on duty in the program. Then, there are some efforts that are expected to minimize these obstacles by providing proper understanding of the employees and parents resources through socialization and also checking the requirements of program beneficiaries carefully.

Keywords: implementation, the smart indonesia program

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakekat Administrasi	10
1. Pengertian Administrasi	10
a. Administrasi Secara Sempit	13
b. Administrasi Secara Luas	14
c. Unsur-unsur Administrasi	15
2. Pengertian Administrasi Negara	16
a. Ciri-Ciri Administrasi Negara	21
b. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara	22
3. Ruang Lingkup Administrasi Negara	24
4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian	26
B. Kebijakan Publik	28
1. Pengertian Kebijakan	28

2. Pengertian Kebijakan Publik	29
C. Implementasi Program	30
1. Pengertian Implementasi Kebijakan (Implementasi Program)	30
a. Pengertian Implementasi	30
b. Pengertian Implementasi Kebijakan	32
2. Pengertian Program	33
3. Pengertian Pendidikan	33
4. Pengertian Program Indonesia Pintar (PIP)	34
D. Kajian Penelitian Terdahulu	36
E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumental	39
1. Kerangka Pemikiran	39
2. Kisi-Kisi Instrumental	41
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	44
B. Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian	47
1. Penentuan Sasaran	47
2. Informan dan Narasumber Penelitian	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	50
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
1. Tujuan Pendidikan Dasar/Menengah	52
2. Visi dan Misi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamulihan.....	52
B. Struktur Organisasi SMPN 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.....	55

C. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan	56
1. Perumusan Masalah	58
2. Agenda Kebijakan.....	65
3. Pemilihan Alternatif Pemecahan Masalah	70
4. Penetapan Kebijakan.....	73
D. Faktor Penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan.....	81
1. Ukuran Tujuan dan Kebijakan	82
2. Sumber-sumber Kebijakan.....	88
3. Ciri-ciri/ Sifat Badan/ Instansi	94
4. Komunikasi Antar Organisasi.....	103
5. Sikap Para Pelaksana.....	111
6. Lingkungan Ekonomi.....	117
E. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan.....	121
1. Ukuran Tujuan dan Kebijakan	122
2. Sumber Daya Kebijakan	127
3. Keberhasilan Kebijakan	131
4. Sikap/ Kecenderungan Para Pelaksana	133
5. Komunikasi Antar Organisasi	137
6. Menilai Kinerja Keberhasilan	140

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	145
5.2 Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA	147
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2.2 Kisi-Kisi Instrumental Penelitian	42
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan	47
Tabel 3.2 Sampel Informan Penelitian	49
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	51
Tabel 4.4 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Merumuskan Kebijakan dengan Baik	59
Tabel 4.2 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Merumuskan Kebijakan dengan baik	61
Tabel 4.3 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Adanya Kontribusi.....	63
Tabel 4.4 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Adanya Kontribusi.....	64
Tabel 4.5 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Masalah yang berdampak besar pada masyarakat	66
Tabel 4.6 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Masalah yang berdampak besar pada masyarakat.....	67
Tabel 4.7 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Masalah Yang Membutuhkan Penanganan Segera.....	69
Tabel 4.8 Triangulasi Pengumpulan Data Masalah yang Membutuhkan Penangan Segera	70
Tabel 4.9 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Membuat Pemecahan Masalah	72
Tabel 4.10 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Membuat Pemecahan Masalah	73

Tabel 4.11 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Hasil-Hasil Dari Kompromi Dari Berbagai Kelompok Berkepentingan Pembuatan Kebijakan	75
Tabel 4.12 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Hasil-Hasil Dari Kompromi Dari Berbagai Kelompok Berkepentingan Pembuatan Kebijakan	76
Tabel 4.13 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Penetapan Kebijakan Berupa Undang-Undang, Yurisprudensi, Kepres, Keputusan Kebijakan	78
Tabel 4.14 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Penetapan Kebijakan Berupa Undang-Undang, Yurisprudensi, Kepres, Keputusan Kebijakan	79
Tabel 4.15 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Adanya ukuran dan tujuan kebijakan	83
Tabel 4.16 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Adanya Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	84
Tabel 4.17 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Sesuai dengan program-program yang direncanakan	86
Tabel 4.18 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Sesuai Dengan Program-program yang direncanakan	87
Tabel 4.19 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Adanya Ukuran dan Tujuan Kebijakan	90
Tabel 4.20 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Adanya Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	91
Tabel 4.21 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Keberhasilan dipengaruhi oleh biaya	93
Tabel 4.22 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Keberhasilan dipengaruhi oleh biaya	94
Tabel 4.23 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Tepat dalam Pelaksanaan	96

Tabel 4.24 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Tepat dalam Pelaksanaan	97
Tabel 4.25 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Kompetensi dalam bidangnya	99
Tabel 4.26 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Kompetensi dalam bidangnya	100
Tabel 4.27 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pengalaman kerja dan integrasi	102
Tabel 4.28 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Pengalaman Kerja dan Integrasi	103
Tabel 4.29 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Komunikasi berperan penting	105
Tabel 4.30 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Komunikasi berperan penting	106
Tabel 4.31 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Adanya koordinasi yang baik	109
Tabel 4.32 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Adanya koordinasi yang baik	110
Tabel 4.33 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Adanya Sikap disiplin.....	112
Tabel 4.34 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Sikap Disiplin....	114
Tabel 4.35 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Merasa memiliki Tanggung jawab terhadap tugas.....	115
Tabel 4.36 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Merasa Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Tugas.....	116
Tabel 4.37 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Ekonomi, Sosial dan Politik Mendukung Kebijakan	118
Tabel 4.38 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Ekonomi, Sosial dan Politik mendukung kebijakan	119
Tabel 4.39 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Mengarahkan kebijakan	123

Tabel 4.40 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Mengarahkan Kebijakan	124
Tabel 4.41 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Melaksanakan Kebijakan	126
Tabel 4.42 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Mengarahkan Kebijakan	127
Tabel 4.43 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Memanfaatkan Sumberdaya Manusia, biaya dan waktu.....	129
Tabel 4.44 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Memanfaatkan Sumberdaya Manusia, Biaya dan Waktu	130
Tabel 4.45 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Ciri-Ciri yang tepat dan cocok dengan badan/instansi.....	132
Tabel 4.46 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Ciri-Ciri yang tepat dan cocok dengan badan/instansi.....	133
Tabel 4.47 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Banyak Mempengaruhi Keberhasilan.....	135
Tabel 4.48 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Banyak Mempengaruhi Keberhasilan.....	136
Tabel 4.49 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.....	138
Tabel 4.50 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.....	139
Tabel 4.51 Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan dilihat dari ekonomi, sosial dan politik	141
Tabel 4.52 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan dilihat dari ekonomi, sosial dan politik.....	143

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	41
3.1 Desain Penelitian	46
4.1 Struktur Organisasi SMPN 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Pendoman Observasi
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Pedoman Dokumentasi
Lampiran 7	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 8	Foto Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia memiliki berbagai macam kegiatan mulai dari berolahraga, bekerja, bersekolah, bagi mereka yang sedang mengejar jenjang pendidikan. Diantara sekian banyak kegiatan manusia, ada salah satu kegiatan manusia yang sangat ingin dicapai hingga mempertaruhkan hidupnya demi para generasinya menjadi manusia yang lebih baik lagi yaitu mengejar jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Tetapi permasalahannya tidak semua bisa mengejar impiannya untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi. Dikarenakan beberapa faktor diantaranya ; Pertama Mahalnya biaya pendidikan, Kedua Fasilitas Pendidikan yang kurang memadai, Ketiga Rendahnya kesempatan pemerataan Pendidikan. Pemasalahan yang biasa kita ketahui yaitu terhambatnya dari segi ekonomi. Sedangkan Pendidikan adalah salah satu syarat utama bagi manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya dapat memberikan harapan yang lebih terhadap masa depannya kelak, kemudian dengan memiliki Pendidikan yang tinggi, manusia dapat bereksplorasi dengan tujuan hidupnya. Dengan permasalahan yang ada, tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dari pemerintah, untuk segera mengambil tindakan atau solusi bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya yang karena faktor ekonomi atau tidak mampu untuk melanjutkan Pendidikan para putra-putrinya.

Pendidikan menjadi salah satu hal penting, yang wajib ditempuh oleh semua orang, karena sangat berpengaruh dalam kesuksesan hidup seseorang,

atau masa depannya kelak. Untuk itu, diusahakannya bagi mereka untuk menempuh Pendidikan setinggi-tingginya, karena ada beberapa hal yang sangat dirugikan bagi mereka yang tidak melanjutkan atau memperjuangkan pendidikannya.

Diantaranya, pertama, peluang kerja yang layak sangatlah kecil, dilihat dari persaingan dunia pekerjaan yang dimana perusahaan atau kantor-kantor membutuhkan calon pegawai dengan kualifikasi yang baik. Seperti lulusan Pendidikan terakhir yaitu Diploma (D3) atau sarjana (S1), dan memiliki keterampilan yang baik dibidang tersebut, agar diterima diperusahaan atau kantor-kantor tersebut. Bukan berarti Pendidikan yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak dapat sukses dan tidak layak, tetapi peluang yang dimiliki untuk beberapa hal tersebut seperti mendapatkan pekerjaan yang layak, jaminan fasilitas yang sebagian besar orang inginkan contohnya, gaji yang besar, bekerja di perusahaan besar, harapan itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan mereka yang memiliki Pendidikan lebih tinggi. Kedua, tidak menjaminkannya memiliki jejang karir yang baik bisa dibilang buruk atau tidak baik.

Jika seseorang hanya mengandalkan ijazah tingkat Pendidikan Menengah apalagi tidak sampai ke tingkat Pendidikan Menengah, hampir dipastikan masa depan atau jejang karir mereka akan sulit mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan diperusahaan dimana mereka bekerja, bahkan tidak sedikit dari mereka bekerja sebagai buruh atau pegawai biasa. Karena ketika seseorang memiliki Pendidikan yang cukup tinggi, mereka cenderung memiliki pengetahuan dan kreatifitas yang lebih baik untuk memberikan kemajuan dalam pekerjaan dan

tempat mereka bekerja. Ketiga, rata-rata berpenghasilan lebih rendah, sudah peluang bekerja ditempat layak sangat kecil, jenjang karir yang kurang baik, kemudian mereka rata-rata berpenghasilan rendah. Lagi-lagi kerugian yang didapatkan apabila tidak memiliki Pendidikan tinggi sangat kurang beruntung bagi mereka yang memiliki harapan besar bagi masadepannya. Kemudian keempat, kurang memiliki relasi dengan orang-orang hebat.

Tujuan Pendidikan nasional telah dirumuskan melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada dua tujuan Pendidikan nasional sebagaimana yang tertulis didalam Undang-Undang Dasar 1945:

- a. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat.

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri, kemudian menjadi bangsa yang merdeka yang dapat memilih dari berbagai *alternative* yang disodorkan oleh dunia modern.

Tujuan Pendidikan Nasional ini suatu proses pemerdekaan manusia Indonesia, agar tidak hanyut dari arus globalisasi ataupun hanya berpangku tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan yang besar di dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia termasuk negara yang mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi, dimana generasi muda adalah harapan kita untuk mengembangkan negara ini dan harus generasi yang tidak lain adalah tinggi akan ilmu Pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun pondasi dalam

meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan, masyarakat sekitar pun harus turut mendukung dan mempunyai kesadaran tinggi dalam meningkatkan Pendidikan putra-putrinya. Dengan merubah pola pikir bahwa para generasi muda harus menjadi penerus bangsa yang beradab. Dengan Pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang mumpuni dalam berbagai ilmu. Disinilah Pendidikan sangat dibutuhkan untuk seluruh negara khususnya Indonesia, dan Pendidikan adalah salah satu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap manusia. Dari Pendidikan seseorang akan belajar menjadi seseorang yang berkarakter dan mempunyai ilmu Pendidikan dan sosial yang tinggi.

Pendidikan umumnya didapatkan dari sekolah seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan kemudian Perguruan Tinggi atau Universitas. Dan kini sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintahan. Bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur undang-undang tentang pendidikan. Peraturan tersebut tertulis dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang disebutkan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan satu sistem pengajaran nasional. Dan pemerintah diwajibkan mengeluarkan biaya untuk menyediakan fasilitas penunjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Keseriusan

pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun terbukti dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjamin semua hak dan kewajiban anak untuk tetap bersekolah sampai SMA.

Pemerintah menetapkan Peraturan Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jendral Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat tentang petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar, dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out). PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta

didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ternyata diketahui bahwa penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi sebagai berikut :

1. Dalam merumuskan permasalahan kurang didukung dengan data atau informasi yang akurat dan *akuntable*. Sehingga berdampak terhadap penanganan masalahnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan data siswa tidak mampu antara pihak sekolah dengan dinas sosial.
2. Kurangnya kontribusi dari pihak penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang sulit mengumpulkan data yang harus diperlukan, yang mengakibatkan data yang turun dari dinas terkadang tidak sesuai. Seperti permasalahan buku rekening yang tidak sesuai dengan apa yang disetorkan sebelumnya, dan ini sangat menghambat pihak sekolah dalam meng-*input* data dengan benar.
3. Belum optimalnya kemampuan pemecahan masalah dari pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang, terhadap kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).

4. Program Indonesia Pintar (PIP) belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya salah sasaran untuk penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menetapkan fokus permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sebagai tambahan referensi penelitian yang bisa digunakan sebagai informasi tertulis mengenai gambaran implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.

b. Bagi Penulis

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus implementasi pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan keadaan dilapangan.

c. Bagi Pihak Lain

Merupakan sumbangan pemikiran referensi pelengkap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

Bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan di Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Yang menjadi lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Ditingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, fungsi manajemen organisasi, fungsi pengawas. Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, yang terpenting adalah administrasi didefinisikan sebagai proses umum yang mengarah, manajemen, dan pengawasan merupakan unsur-unsurnya.

Sebagai suatu metode, administrasi berlangsung dalam organisasi formal, yaitu suatu unit sosial yang dibentuk untuk tujuan yang mencakup unsur-unsur konflik dan unsur-unsur perubahan. Organisasi, dengan struktur formalnya, kelompok-kelompok sosial, lingkungan sosial, sumber-sumber dan tujuan-tujuan merupakan bahan dasar seorang administrator bekerja. Tugas seorang administrator adalah melaksanakan pekerjaan melalui proses pengorganisasian sumber-sumber dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anggara (2012:13-14) berikut definisi dari beberapa istilah yang berkaitan dengan administrasi :

1. Administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir (*goal and objectives*).

2. Administrator adalah anggota organisasi yang tugas utamanya melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Petugas lembaga publik (walaupun tugasnya dapat meliputi unsur administrasi), bukan administrator dan bukan pula pegawai biasa, tetapi pegawai senior yang merupakan administrator atau pejabat organisasi.
3. Sistem pimpinan (*executive system*) adalah serangkaian posisi tempat organisasi diadministrasikan. Hal ini terlihat jelas dalam organisasi yang sangat ditonjolkan, misalnya dalam departemen pemerintah yang bidang kekuasaan setiap jenjagnya dengan jelas ditentukan. Pada organisasi-organisasi yang kurang birokratis, hal itu tidak jelas terlihat, misalnya pada Lembaga-lembaga publik. Walaupun petugas Lembaga publik merasa perlu mempertimbangkan banyak unsur serta adanya pertanggungjawaban pada setiap tingkatan, banyak bukti yang menunjukkan adanya struktur organisasi yang terdiri atas serangkaian hubungan manajerial yang terus-menerus yang disebut sebagai hierarkik pimpinan.
4. Pimpinan (*executive*) adalah pemegang posisi ditingkat teratas dari struktur formal, misalnya direktur umum, kepala kantor wilayah, dan lain-lain. Inilah suatu posisi yang kekuasaan administratif secara menyeluruh dibebankan kepadanya dan dari sinilah mengalir kegiatan administratif yang paling luas.

Pada perkembangan zaman sekarang ini terdapat kemajuan yang sangat pesat dalam bidang Administrasi. Secara etimologis Administrasi berasal dari bahasa latin , yang terdiri dari *administrate* yang berarti melayani.

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare* (*to serve, melayani*). Prefiks *ad-* berfungsi mengintensifikasi kata *ministrare*. Kata *ministrare* berkaitan dengan kata *minister* (*a person authorized to conduct religious worship; a clergyman; pastor*) dan *ministry* (*the service, fuctions, or profession of a minister of religion*). Akar kata *-minister* mengandung serabut kata *minis* – artinya *-less*, kurang; kata *minis* – berkaitan dengan kata *minor*, artinya kecil. Jadi orang yang melayani (yang melakukan servis), yaitu *servant*, memiliki posisi lebih rendah daripada orang atau pihak yang dilayani olehnya. Jadi, konsep

administrasi setidaknya pada mulanya menunjukkan relasi tidak setara antara *minister* dengan pihak yang dilayani.

Dalam konsep *ministry*, yang dilayani oleh *minister* adalah Tuhan (pihak lain yang lebih tinggi). Dalam konteks ini, pelayanan bukanlah proses *exchange* dan tidak didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan supra rasional yang disebut juga sikap pasrah.

Administrasi berasal dari bahasa Yunani *administrare* yang bermakna melayani, membantu dan memenuhi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan perkataan *administration* yang sebenarnya juga berasal dari bahasa Yunani : AD yang berarti intensif dan *ministrare* yang berarti melayani. Secara etimologis dapat disimpulkan bahwa administrasi berarti melayani secara rapih dan sempurna.

Menurut Sondang dalam "Filsafat Administrasi" (2000:24) Administrasi adalah satu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasio-rasio tertentu, oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula.

Siagian (2001:4) dalam bukunya "Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strategi" Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dapat disimpulkan jika Administrasi bisa diartikan sebagai seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan alat organisasi sehingga tujuan tersebut bisa tercapai.

a. Administrasi Secara Sempit

Menurut Handyaningrat (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut :

“Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*)”.

Administrasi dalam arti sempit dimaksudkan sebagai tata usaha atau *office work* yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, dokumentasi, pendaftaran atau registrasi dan soal-soal kearsipan.

Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh.

Menurut Atmosudirdjo dalam Ayub (2007:30) Administrasi secara sempit adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya.

Menurut Nawawi (2009:33) Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional.

Dapat disimpulkan administrasi secara sempit dikatakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya.

b. Administrasi Secara Luas

Administrasi secara luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

Ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai administrasi dalam arti luas. Menurut Siagian (2007:30) Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila melihat pendapat dari Sondang P Siagian, administrasi dapat diilustrasikan seperti pemain sepakbola yang melakukan sebuah kerjasama bersama pemain lainnya untuk memenangkan timnya dalam sebuah pertandingan.

Menurut Nawawi (2009:35) Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien.

Anggara (2012:20-21) dalam pengertian luas mengemukakan administrasi dapat dilihat dari tiga sudut hingga mencakup pula tiga pengertian yaitu dari sudut proses, fungsi dan kelembagaan. Sebagai berikut :

1. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud tercapai.

2. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai untuk mengetahui macam tugas (fungsi kerja) misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi dan sebagainya.
3. Dari sudut kelembagaan administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Orang-orang itu terdiri atas empat golongan yaitu :
 - 1) Administrator; orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan;
 - 2) Manajer; orang yang langsung memimpin pekerjaan ke arah tercapainya hasil yang nyata;
 - 3) Pembantu ahli (staf); terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain trust*) dan berfungsi di bidang pemikiran;
 - 4) Karyawan; para pelaksana dan pekerja yang digerakan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan pengertian administrasi mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

c. Unsur-unsur Administrasi

Anggara (2012:29) Dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerjasama.
- 2) Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja. Hubungan ini meliputi :
 - a) Perencanaan;
 - b) Pembuatan keputusan;
 - c) Pembimbing;
 - d) Pengoordinasian;
 - e) Pengawasan;
 - f) Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja
- 3) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerjasama.

- 4) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan.
- 5) Keuangan, yaitu pengelolaan segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
- 7) Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.
- 8) Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama.

2. Pengertian Administrasi Negara

Menurut Robbins dalam Anggara (2012:134) mengemukakan bahwa *Administration in the universal process of vilocioncy getting activities completed with and thought other people* (administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas – aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain).

Menurut Litchfird dalam *Notes on A General Theory of Administration*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Syafei (2003:33) dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :
 “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan, dan dipimpin”

Menurut Pffifner dan Presthus yang dikutip Syafei (2003:31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut :

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok yang melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Siagian dalam Anggara (2012:135) memberikan definisi bahwa: "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya".

Kemudian menurut Akadun (2009:18) mengatakan bahwa: "Administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian". Lebih lanjut Silalahi berpendapat yaitu: "Administrasi merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif".

Menurut Tjokroamidjodjo (1995:3) bahwa ilmu administrasi adalah ilmu mengenai kerjasama manusia dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara khusus, Ramto dalam Anggara (2012:135) mengemukakan bahwa pengertian administrasi mencakup proses penentuan arah, tujuan atau sasaran dan norma-norma atau cara-cara untuk mencapai berupa kebijaksanaan atau program yang bersifat menyeluruh.

Menurut Tread dalam Anggara (2012:135) mengemukakan :

Administration is conceived the necessary activities of these individual (excuties) in an organization mwho charge with ordering forwarding, and realize certain defined purpose

Administrasi meliputi kegiatan individu dalam suatu organisasi yang bertugas bekerja sama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan.

White dalam Anggara (2012:135) menyatakan *Administrastion is process common to all groups efforts, public or private, civil or military, large scale or*

small scale. (Administrasi adalah proses yang umumnya dijumpai di semua kegiatan kelompok, baik publik maupun privat, sipil atau militer, dalam ukuran besar atau kecil).

Konsep paling baik untuk menjelaskan administrasi negara adalah konsep administrasi sebagai suatu proses. Dimock dalam Anggara (2012:136) mengemukakan *A process it is all the steps taken between the turn in enforcement agency assumes jurisdiction and the lost brick is placed* (sebagai proses administrasi negara meliputi semua langkah yang diambil diantara saat badan pelaksanaan menerima kewenangan dan saat batu terakhir diletakkan. Dengan demikian sebagai suatu proses administrasi Negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai pada penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut.

Menurut Anggara (2012:136) yang dinamakan atau disebut administrasi Negara dalam ilmu pengetahuan mempunyai beberapa arti, bergantung pada segi pandangannya. Diatas telah diberikan definisi kerja secara singkat mengenai administrasi Negara. Secara lengkap, administrasi Negara mempunyai tiga pengertian pokok, yaitu :

1. Administrasi Negara sebagai fungsi/tugas pemerintah;
2. Administrasi Negara sebagai aparat/aparatur pemerintah;
3. Administrasi Negara sebagai proses teknik pengerjaan.

Dalam buku ini, ketiga arti tersebut dipergunakan secara silih berganti, bergantung pada konteks kalimatnya. Administrasi Negara sebagai fungsi atau

tugas pemerintah merupakan salah satu diantara lima tugas/fungsi pemerintah, yang terdiri atas :

1. Menegakan persatuan dan kesatuan nasional (bangga nasional) dan territorial (wilayah kedaulatan);
2. Mengembangkan kebudayaan nasional di atas kebudayaan kesukuan dan kedaerahan;
3. Pemerintahan;
 - a. Pengaturan perundangan;
 - b. Pembinaan masyarakat Negara;
 - c. Kepolisian;
 - d. Peradilan;
4. Administrasi Negara
5. Bisnis atau niaga (non komersial dan komersial). Bisnis non komersial adalah bisnis tanlaba atau nirlaba, bisnis yang tidak mengejar laba. Bisnis komersial mengejar laba (*profit making bisnis*).

Istilah pemerintah mempunyai tiga arti, yakni :

- a. Pemerintah sebagai wakil (yang mewakili) Negara;
- b. Pemerintah sebagai pimpinan harian Negara, menjalankan pimpinan yang disebut pemerintahan, terdiri atas pemerintahan politik dan administrative;
- c. Pemerintah sebagai setiap jabatan dan keseluruhan jabatan yang berwajib dan berwenang menegakan serta mempergunakan wibawa dan kekuasaan Negara.

Menurut Anggara (2012:137). Dalam arti kedua dan ketiga, pemerintah menjalankan pemerintahan terdiri atas pemerintahan politik (pemerintahan eksekutif, pemerintahan dalam arti terbatas dan pemerintahan administrasi, pelaksanaan non politik). Menjalankan pemerintahan dalam arti terbatas dan politik berarti :

1. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. Undang-undang adalah setiap peraturan atau ketentuan yang dirumuskan secara umum, abstrak, impersonal, dan imperative artinya bersifat memaksa dan tidak dapat dilawan oleh siapapun.
2. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat Negara (melakukan penelitian, pemanggilan, pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya tanpa memandang orang per orang).
3. Menjalankan kepolisian (bertindak langsung terhadap setiap pelanggar undang-undang tanpa pandang bulu).
4. Melakukan peradilan (menyelesaikan persengketaan hokum, atau membentuk badan peradilan untuk itu).

Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan Negara) dalam berbagai bentuk, yang satu samaa lain bergantung pada materi dan tujuannya : peraturan strategi, *policy*, rencana, *budget*, intruksim perintah dan sebagainya. Keputusan-keputusan pemerintah tersebut bersifat dan berlaku secara umum artinya tidak ditujukan kepada atau terhadap seseorang atau badan atau kasus tertentu, melainkan bersifat aturan (*rule*) atau prinsip umum atau ketentuan umumu. Hal ini karena bertujuan memecahkan masalah atau menangani urusan kepentingan umum, baik kepentingan Negara maupun kepentingan masyarakat umum. Keputusan (kehendak pemerintah tersebut dijalankan/diselenggarakan oleh administrasi Negara. Administrasi Negara pada hakekatnya seperti yang telah diuraikan di atas, adalah pemerintahan yang bersifat pelaksanaan kehendak

pemerintah secara teknis administrative pada prinsipnya bersifat non politik (tidak hendak menunjukkan dan mempergunakan kekuasaan Negara, melaksanakan pada prinsipnya hendak melayani masyarakat sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku), disingkat menjadi pemerintah administrasi atau administrasi Negara.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

a. Ciri-Ciri Administrasi Negara

Administrasi Negara memiliki ciri khusus dibandingkan dengan swasta. Berikut ini uraian ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk menidentifikasi administrasi negara terutama bila dibandingkan swasta.

Mnenurut Toha (2002:47-48), ciri-ciri perbedaan tersebut adalah :

- a. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat *urgent* dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, maka tidak ada jalan.
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan warna legislatives dari admnistrasi negara tersebut.
- d. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
- e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat tergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Selanjutnya Toha (2002:48-49) mengemukakan perbedaan administrasi negara dengan institusi-institusi yang lain, yaitu:

- a. Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari;
- b. Administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan;
- c. Administrasi Negara mempunyai ukuran tidak terbatas
- d. Pimpinan atasannya (*top management*) bersifat politis
- e. Melaksanakan administrasi negara adalah sangat sulit diukur

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa administrasi negara sangat erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat, dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas pada pengaruh politik.

b. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara

Menurut Silalahi (2011:258) “Prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran pokok yang memberikan petunjuk kepada pemikiran atau tindakan yang diambil. Prinsip merupakan dasar atau landasan untuk bertindak”.

Dalam penerapannya pada administrasi atau manajemen, prinsip-prinsip adalah fleksibel, karena harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang dapat berubah-ubah. Dan prinsip utama dalam administrasi atau manajemen adalah “efisien” (daya guna) dan “efektivitas” (hasil guna) dalam mencapai tujuan yang direncanakan.

Agar tujuan atau hasil dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka proses administrasi atau manajemen yaitu:

- 1) Pembagian pekerjaan;
- 2) Kewenangan dan tanggungjawab;
- 3) Disiplin;
- 4) Kesatuan perintah;
- 5) Kesatuan arah/tujuan;
- 6) Mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan individu;

- 7) Penggajian;
- 8) Sentralisasi;
- 9) Skala hirarki;
- 10) Tata tertib;
- 11) Keadilan;
- 12) Stabilitas dari pada jabatan;
- 13) Prakarsa;
- 14) Solidaritas antara kawan sekerja.

Dalam buku Ilmu Administrasi Negara, Anggara (2012:363) mengemukakan bahwa:

“Dengan kebenaran bahwa prinsip administrasi memang ada dan tetap berlaku, yaitu dengan Batasan, prinsip “bekerja” dalam suasana administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian, hal itu diikuti oleh kebenaran bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun juga dengan berhasil”.

Menurut Gulick dan Urwick dalam Anggara (2012:364) prinsip-prinsip administrasi adalah penting, sedangkan dimana prinsip tersebut diterapkan tidak penting. Fokus lebih penting dari pada lokus. Sebagaimana mereka mengemukakan bahwa:

“bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa ditemukan secara induktif dari kajian organisasi manusia yang menentukan susunan semua jenis asosiasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipelajari sebagai masalah teknis, tanpa memandang tujuan, orang yang ada didalamnya, maupun undang-undang, teori sosial atau politik yang mendasari terciptanya asosiasi tersebut”.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa prinsip administrasi adalah sebuah penerapan yang dimana prinsip utamanya yaitu efisien dan efektivitas, prinsip administrasi pun sebuah kebenaran bahwa prinsip administrasi memang ada dan tetap berlaku, dimana prinsip tersebut harus diterapkan kemudian dilaksanakan secara focus tanpa memandang tujuan dan lokus.

3. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika yang dihadapi masyarakat. Dikatakan Chandler dan Plato (Keban, 4:2008) bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi negara juga semakin kompleks. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi negara maka bisa dikaji dari tulisan-tulisan teoritis dan praktis administrasi negara yang populer dan dapat dijadikan dasar.

Fayol (1995:115) memberikan beberapa ruang lingkup yang dibahas antara lain sebagai berikut :

- 1) Organisasi, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi;
- 2) Manajemen, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran politik dan manajemen sumber daya manusia;
- 3) Implementasi yang menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Ulbert (2011:99) menyimpulkan unsur-unsur ilmu administrasi atau dimensi administrasi sebagai berikut:

- 1) Organisasi;
- 2) Manajemen;
- 3) Kepemimpinan;
- 4) Pengambilan keputusan
- 5) Komunikasi atau hubungan manusia.

Menurut Keban (2004: 11) ruang lingkup suatu administrasi negara mencakup beberapa aspek yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan
2. Organisasi
3. Manajemen
4. Moral atau Etika
5. Lingkungan
6. Akuntabilitas Kinerja

Dari rumusan administrasi negara di atas, dapat dikenali dan dirumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi negara, LAN RI (2003:10) mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem lingkup perhatian administrasi tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Tata nilai, yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultural, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara bangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
2. Organisasi pemerintah negara, yang meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintah negara yang berada di wilayah pemerintahan negara dan sering disebut birokrasi pemerintah, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
3. Manajemen pemerintah negara, meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintah umum dan membangun dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintah.
4. Sumber daya aparatur negara, sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara: pengelolaan dan pembinaannya merupakan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya.
5. Sistem dan proses kebijakan negara, sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan negara.
6. Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam negara, negara eksis dalam suatu wilayah karena adanya kesempatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut.

7. Hukum administrasi negara, hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi tugas fungsi lembaga-lembaga pemerintah negara, saling hubungannya satu sama lain, dan karya masing-masing lembaga tata cara menghasilkannya, dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, profesional, efektif, tertib dan *legitimate*.

Dekimian dapat penulis simpulkan dari beberapa para ahli diatas, bahwa Secara sistemik, berbagai pokok pengamatan dalam disiplin dan sistem administrasi negara tersebut dapat dikelompokan atas unsur-unsur yang melekat pada suatu sistem, yaitu organisasi, manajemen, sumber daya aparatur negara, sistem dan posisi.

4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Pencapaian suatu tujuan baik didalam suatu program yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari seberapa efektif penerepan atau implementasi itu dibuat dan dilaksanakan. Implementasi mengacu pada pencapaian tujuan, artinya suatu kebijakan yang sudah ditetapkan dan harus diterapkan. Agar apa yang dituju agar tecapai atau terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya mengenai pengertian Impelementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budi winarno (2012:146), adalah sebagai berikut :

“implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Sementara menurut Ripley dan Franklin dalam winarno (2012:148) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Demikian pengertian implementasi sebagai ukuran suatu pencapaian suatu tujuan program, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan penerapan yang telah ditetapkan yang harus dilaksanakan sesuai prosedur agar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Tanpa adanya implementasi yang jelas maka program yang dibuat tidak akan berhasil. Mengingat sangat pentingnya implementasi suatu program, maka setiap pemimpin maupun pegawai harus senantiasa berupaya untuk melaksanakannya, sehingga dapat tercipta kegiatan yang efektif.

Dengan demikian, implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses program. Oleh karena itu, agar pelaksanaan dapat dikatakan efektif mampu mencapai tujuan yang diharapkan, maka harus mempergunakan Tahap-tahap dalam perumusannya, seperti yang dikemukakan oleh Budi Winarno (2012: 123-125), sebagai berikut :

- a. Perumusan Masalah;
- b. Agenda Kebijakan;
- c. Penilaian Alternatif;
- d. Penetapan Kebijakan.

Kaitan antara Administrasi dengan penelitian yang penulis lakukan ini adalah mengingat bahwa salah satu kriteria pokok yang ada pada Administrasi adalah Penerapannya atau suatu implementasi. Implementasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pengukuran yang terkait dengan pencapaian suatu tujuan yang ingin dicapai sebelumnya dengan hasil yang telah di capai sebenarnya. Maka dari itu penulis menganggap bahwa penelitian yang penulis lakukan yang berjudul

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) berhubungan erat dengan program studi yang penulis ikuti yaitu Administrasi Negara.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Yang dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Berikut beberapa definisi menurut para ahli, sebagai berikut :

Menurut Dye dalam Abidin (2012:5) menyebutkan “ kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*)”.

Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar kebijakan publik* mengutip pendapat Carl Friedrich yang mengartikan kebijakan sebagai berikut:

”kebijakan adalah serangkaian tindakan-tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (friedrich dalam Agustino, 2012:7)”.

Berkaitan dengan definisi-definisi tentang kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan menurut Agustino (2012:8), yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

3. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau apa yang dikerjakan.
4. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negative. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Singadilaga dalam Anggara (2012:499) mengemukakan beberapa penjelasan tentang kebijakan publik, sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
- b. Pelaku kebijakan, adalah orang, sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.
- c. Lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *issues* atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Kebijakan Publik relatif masih baru dan menjadi kajian dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Analisis kebijaksanaan, selain merupakan metode untuk memahami apa dan bagaimana kebijaksanaan terjadi, juga banyak membantu

dalam mengkaji proses kebijaksanaan. Oleh karena itu, Kartasmita dalam Anggara (2012:500) menegaskan bahwa fungsi menyelenggarakan pembangunan untuk mengembangkan studi kebijaksanaan public dalam pembangunan, termasuk memahami kondisi lingkungan kebijaksanaan (*policy environment*). Ini berarti kondisi lingkungan dalam arti pembangunan mempengaruhi terhadap kebijaksanaan publik yang akan dilaksanakan.

Dalam pengertian Islamy dalam Anggara (2012:501) terdapat empat pengertian tentang kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah;
- b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
- d. Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari beberapa yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah serangkaian keputusan yang telah dipilih, yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan pembangunan kebijaksanaan publik yang ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat dengan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.

C. Implementasi Program

1. Pengertian Implementasi Kebijakan (Implementasi Program)

a. Pengertian Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012:148) berpendapat bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-

undang ditetapkan yang memberikan otoritasn program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Menurut Budi Winarno (2012:123) mendefinisikan implementasi memiliki tahap perumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah
2. Agenda Kebijakan
3. Pemilihan Alternatif pemecahan masalah
4. Penempatan kebijakan

Menurut Grindle dalam Budi Winarno (2012:149) mengatakan bahwa “secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Pressman dan Wildavsky dalam Tachjan (2008:24), mengemukakan bahwa "*implemmentation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.*" Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebagai suatu konsep semua kegiatan, dan implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep tersebut bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah organisasi, dan Teknik-teknik pengendalian. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam Anggara (2012:530) mengatakan bahwa “implementasi sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden”.

Menurut Udoji dalam Anggara (2012:531) mengemukakan bahwa *“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”*. Artinya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Pengertian implementasi dikemukakan juga oleh Solichin dalam Anggara (2012:531) mengatakan bahwa:

“salah satu alasan yang dapat diberikan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, adalah birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada tujuan”

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut

masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

2. Pengertian Program

Herman (Farida, 2008:9), mengemukakan definisi program sebagai, “Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”.

Sedangkan menurut Hasibuan (2006:72), juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Di dalam era globalisasi ini

terjadi loncatan-loncatan atau transformasi nilai-nilai kehidupan dan oleh sebab itu juga terjadi perubahan dalam proses pematangan atau Pendidikan.

Definisi Pendidikan pun dikemukakan oleh Tilaar (2009:50) yang mengatakan bahwa:

“Pendidikan merupakan kegiatan yang esensial dalam setiap kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak mungkin terjadi atau terlepas dari kehidupan masyarakat. Dan oleh karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya, maka pendidikan merupakan suatu kegiatan budaya”.

Menurut Friedrich Froebel dan Maria Montessori dalam Tilaar (2009:51)

“*Child-centered pedagogy* telah membawa konsep Pendidikan pada perkembangan psikologis anak yang secara tidak langsung membatasi Pendidikan sebagai proses pendewasaan anak dengan mengembangkan kemampuan-kemampuan psikologisnya”.

Menurut Paulo Freire dalam Tilaar (2009:52) mengemukakan bahwa “Pendidikan adalah proses pemerdekaan atau kesadaran akan kebebasan manusia yang memiliki potensi-potensi tertentu dalam hidupnya berhadapan dengan alam sekitarnya”.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

4. Pengertian Progam Indonesia Pintar (PIP)

Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa

yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang

Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014 Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” maupun “orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian-penelitian tentang implementasi kebijakan. Adapun beberapa skripsi yang membahas judul adalah sebagai tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi/Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Impelemntasi kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kualitatif 	Model implementasi kebijakan yang	Impelemntasi kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang

	<p>2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makasar Universitas Hasanuddin Makassar Oleh : Asrul Nurdin, (2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara. • Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel dalam menentukan informan penelitian adalah dengan menggunakan <i>Purporsive Sampling</i> • Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data) 	<p>digunakan menurut Edward III dalam Subarsono (2008:89)</p>	<p>Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen merupakan peraturan yang mengatur bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial menyangkut anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen</p>
1	2	3	5	6
2.	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Oleh : Muhammad Rafiudin, (2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kualitatif • Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi • Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel dalam menentukan informan penelitian adalah dengan menggunakan 	<p>Model implementasi kebijakan yang digunakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:144)</p>	<p>Implementasi PKH di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak mengenai pengetahuan dan sosialisasi program PKH yang dilakukan oleh petugas/ pendamping hanya dilakukan anatar penerima program PKH dan petugasnya saja. Sementara, sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh masyarakat luas tidak dilakukan dengan baik. Dengan pejabat kecamatan dan pejabat RT juga tidak dilakukan dengan baik. Sehingga <i>stakeholder</i> pendukung program</p>

		<p><i>purporsive sampling</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu <i>data reduction</i> (reduksi data), <i>data display</i> (penyajian data), dan <i>verification</i> (verifikasi) 		PKH belum mendukung sepenuhnya.
3.	<p>Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) pada Kantor Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Universitas Sebelas April Sumedang Oleh : Ary Nanda Nugraha, (2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kualitatif • Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara • Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel dalam menentukan informan penelitian adalah dengan menggunakan <i>purporsive sampling</i> • Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu <i>data reduction</i> (reduksi data), <i>data display</i> (penyajian data), dan <i>verification</i> (verifikasi) 	<p>Model implementasi kebijakan yang digunakan menurut Edward III dalam Agustino (2014:149-154)</p>	<p>Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) pada Kantor Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan maksimal. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh pegawai sudah cukup baik, namun belum tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang belum memahami dan melaksanakan kebijakan pembuatan KTP-EL di Kantor Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang</p>

E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai Pendidikan khusus untuk anak sekolah yang tidak mampu dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Program Indonesia Pintar dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

Kurangnya kontribusi dari pihak penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang sulit mengumpulkan data yang harus diperlukan, yang mengakibatkan data yang turun dari dinas terkadang tidak sesuai. Seperti permasalahan buku rekening yang tidak sesuai dengan apa yang disetorkan sebelumnya, dan ini sangat menghambat pihak sekolah dalam meng-*input* data dengan benar. Kemudian kurangnya pemahaman dalam mencari solusi pembuatan pemecahan masalah yang ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya kurang didukung dengan data atau informasi yang akurat dan *akuntable*, dalam menangani permasalahan data-data siswa sehingga berdampak terhadap penanganan masalahnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan data siswa antara pihak sekolah dengan dinas sosial. Maka dari itu Program Indonesia Pintar (PIP) belum terimplementasikan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari terjadinya salah sasaran untuk penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian mencoba mengansalisis fenomena yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang dengan menggunakan model teori implementasi kebijakan menurut Budi Winarno (2012:123). Dikarenakan keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi kebijakan program. Melihat hal ini penulis ingin melihat peran faktor implementasi dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya gambar kerangka pemikiran dapat dilihat pada bagan berikut :

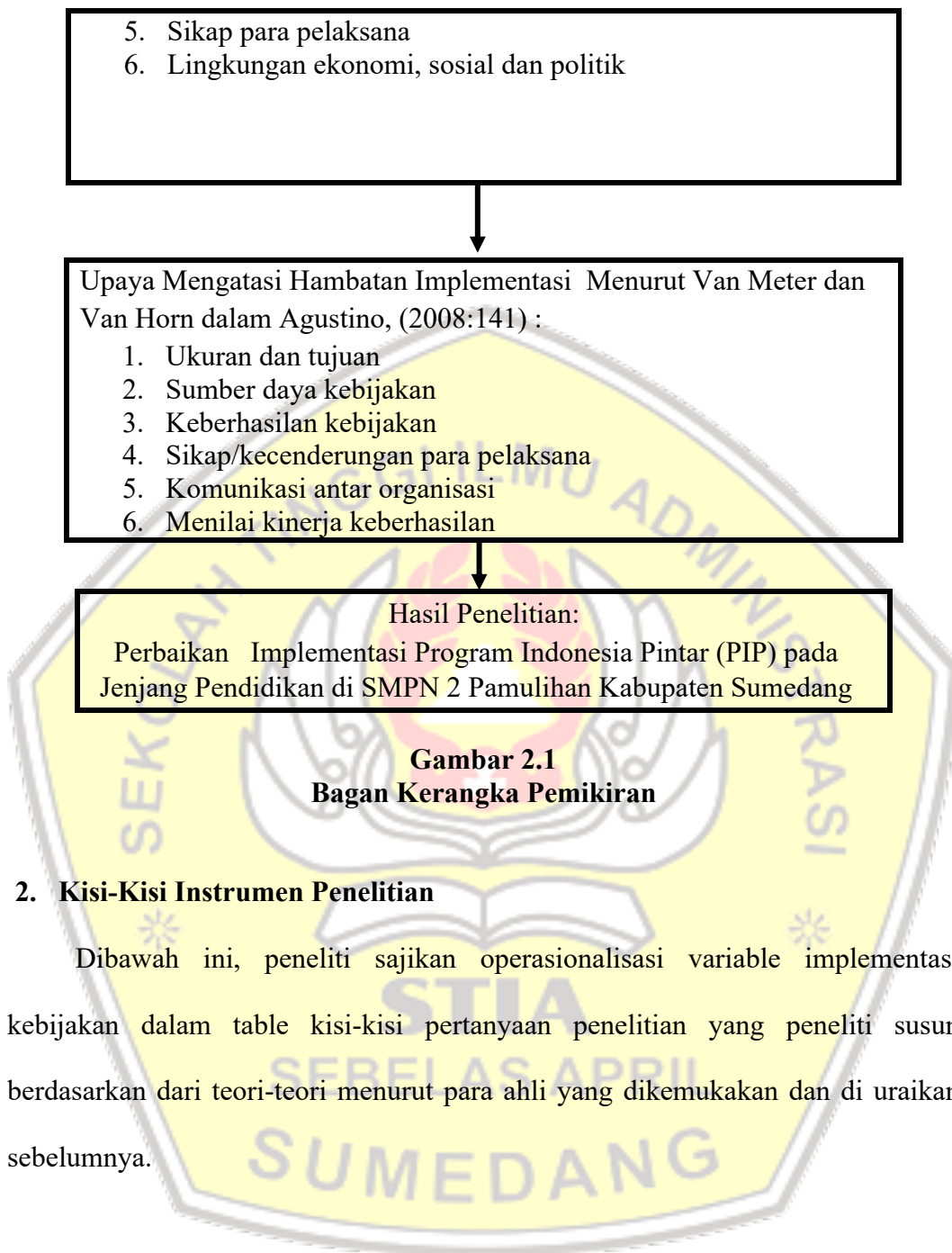
Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Pendidikan di SMPN 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang

Model Implementasi Kebijakan menurut (Winarno, 2012:123) :

1. Perumusan masalah
2. Agenda kebijakan
3. Pemilihan alternatif pemecahan masalah
4. Penetapan kebijakan

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, (2008:89):

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri/sifat badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Dibawah ini, peneliti sajikan operasionalisasi variable implementasi kebijakan dalam table kisi-kisi pertanyaan penelitian yang peneliti susun berdasarkan dari teori-teori menurut para ahli yang dikemukakan dan di uraikan sebelumnya.

Tabel 2.2
Kisi – Kisi Instrumen Penelitian

Fokus Permasalahan	Dimensi	Indikator	Item
1	2	3	4
Implementasi Kebijakan (Winarno, 2012:123)	1. Perumusan masalah	a. Merumuskan kebijakan dengan baik b. Adanya kontribusi	1 2
	2. Agenda Kebijakan	a. Masalah yang berdampak besar terhadap masyarakat	3
		b. Masalah yang membutuhkan penanganan segera	4
	3. Pemilihan alternatif pemecahan masalah	a. Membuat pemecahan masalah	5
4. Penetapan kebijakan	a. Hasil-hasil dari kompromi dari berbagai kelompok berkepentingan pembuatan kebijakan	6	
		b. Penetapan kebijakan berupa undang-undang, yurisprudensi, kepres, keputusan kebijakan	7
Faktor Penghambat implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2008:79)	1. Ukuran dan tujuan kebijakan	a. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan	8
		b. Sesuai dengan program-program yang direncanakan	9
	2. Sumber-sumber kebijakan	a. Keberhasilan dipengaruhi oleh SDM	10
		b. Keberhasilan dipengaruhi oleh biaya	11
	3. Ciri-ciri/sifat badan/ instansi pelaksana	a. Tepat dalam pelaksanaan	12 13
b. Kompetensi dalam bidangnya		14	
c. Pengalaman kerja dan integrasi			

	4. Komunikasi antar organisasi	a. Komunikasi berperan penting b. Adanya koordinasi yang baik	15 16
	5. Sikap para pelaksana	a. Sikap disiplin b. Merasa memiliki terhadap tugas	17 18
	6. Lingkungan ekonomi	Ekonomi, sosial dan politik mendukung kebijakan	19
Upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan (Van Metter dan Van Horn dalam Agustino, 2008:141)	1. Ukuran dan Tujuan	a. Mengarahkan kebijakan b. Melaksanakan kebijakan	20 21
	2. Sumber Daya Kebijakan	Memanfaatkan sumber daya manusia, biaya dan waktu	22
	3. Keberhasilan Kebijakan	Ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan badan/instansi	23
	4. Sikap/ kecenderungan para pelaksana	Banyak mempengaruhi keberhasilan	24
	5. Komunikasi antar organisasi	Mekanisme yang ampuh dalam impelentasi kebijakan	25
	6. Menilai kinerja keberhasilan	Keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan dilihat dari ekonomi, sosial dan politik	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa:

“Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantitatifkan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya”.

Selain itu, Sugiono (2012:9) juga mengemukakan bahwa:

“Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpul data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73) mengatakan bahwa:

“Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan”.

Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini ingin lebih mengeksplor tentang Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan Desain Penelitian di bawah ini yaitu sebagai berikut :

Indikasi (Fenomena Permasalahan)

1. Kurangnya kontribusi dari pihak penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang sulit mengumpulkan data yang harus diperlukan.
2. Kurangnya pemahaman dalam mencari solusi pembuatan pemecahan masalah yang ada.
3. Program Indonesia Pintar (PIP) belum terimplementasikan dengan baik

Fokus Permasalahan

1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?

Fokus Permasalahan

1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang ?

Model Teori yang Digunakan

Model teori yang digunakan menurut Winarno, (2012:123) :

1. Perumusan masalah
2. Agenda kebijakan
3. Pemilihan alternatif pemecahan masalah
4. Penetapan kebijakan

Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:79) :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri/sifat badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:141) :

1. Ukuran dan tujuan
2. Sumberdaya kebijakan
3. Keberhasilan kebijakan
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi
6. Menilai kinerja keberhasilan

B. Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Menurut Sugiono (2003: 90) menyebutkan bahwa : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : Objek – Subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian kali ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah yang berhubungan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu seluruh pegawai di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang sebagai implementor dari implementasi Program Indonesian Pintar (PIP). Hal ini diperkuat dengan data hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Jumlah Pegawai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan

No.	Unit Organisasi	Jumlah
1	2	3
1.	Kepala Sekolah	1
2.	Ketua Komite	1
3.	Pengawas Pembina	1
4.	Waka Kesiswaan	1
5.	Waka Kurikulum	1
6.	Waka Sarana dan Prasarana	1
7.	Waka Humas	1
8.	Kaur Tata Usaha	1
9.	Pembina Osis	1
10.	Bendahara BOS	1
11.	Operator Sekolah	1
12.	Administrasi Sekolah	1
13.	Kurikulum dan Kesiswaan	1
14.	Sarana dan Prasarana	1
15.	Kepegawaian	1

16	Pustakawati	1
17	Pramu Sekolah	1
18	Kepala Perpustakaan	1
19	Kepala Multimedia	1
20	Koordinasi PLH	1
21	Koordinasi Wirausaha	1
22	Kepala Laboratorium	1
23	Koordinasi BP	1
24	Kepala DKM	1
25	Kepala UKS	1
26	Guru	23
	JUMLAH	48

Penyusun mengambil sejumlah orang tersebut di atas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan kompeten dan bertanggung jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Informan dan Narasumber Penelitian

Menurut Sugiyono (2003: 91) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.

Sedangkan teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang pegawai di bagian Administrasi Sekolah, Waka Kesiswaan, Kurikulum dan kesiswaan, Kaur Tata Usaha. yang dijadikan sampel informan penelitian, dikarenakan berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan mampu memahami mengenai Program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Tabel 3.2

Sampel Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah Orang
1	Wakil Kepala Kesiswaan	1
2.	Kaur Tata Usaha	1
3.	Operator Sekolah	1
4.	Administrasi Sekolah	1
	JUMLAH	4

Dengan demikian yang dijadikan sampel adalah mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabputen Sumedang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu data yang diperoleh dilakukan melalui :

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku – buku atau literatur – literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan laporan penelitian.
2. Studi lapangan, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Observasi langsung, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan data – data yang diperlukan untuk penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan kepada para pegawai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berupa berbagai macam peraturan dan perundang – undangan tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

D. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data

Dengan penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengolahan data yang di tempat dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246), yaitu sebagai berikut :

1. *Data reduction* (Reduksi data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. *Data display* (Penyajian data)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, sehingga data yang dilakukan cenderung bersifat naratif. Selanjutnya Sugiyono (2005:95) menyarankan selain dengan teks naratif, juga berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan chart.
3. *Conclution Drawing/ verification* (Penarikan kesimpulan/Verifikasi)
Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek penelitian dan didukung oleh data – data yang mantap. Kesimpulan ini akhirnya dapat dijadikan hipotesis penelitian.
4. Triangulasi
Yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

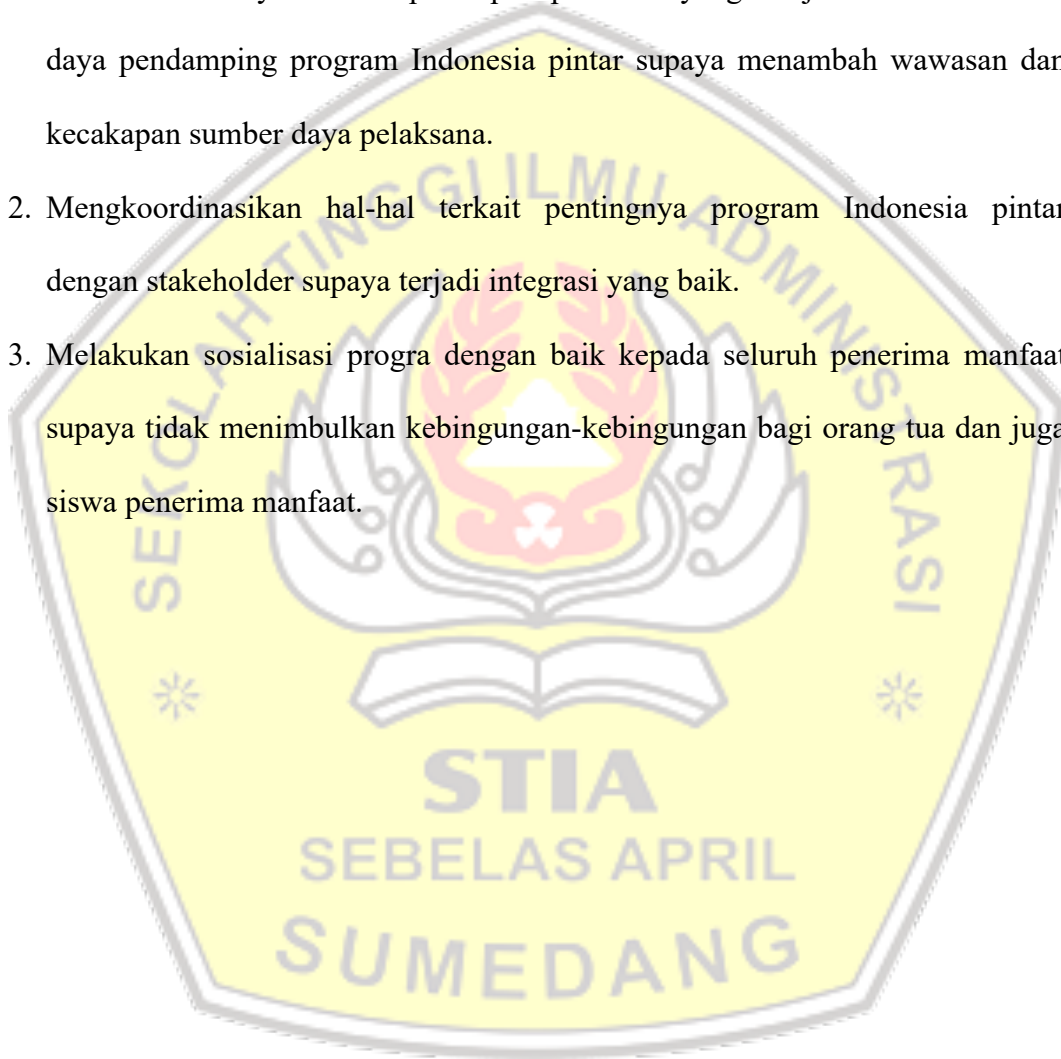
Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang sudah baik namun belum optimal.
2. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Indonesia pintar ini, diantaranya yaitu masih ditemui ketidak tepat sasaran program, minimnya sosialisasi, minimnya koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait, dan juga kurang cakupnya sumber daya manusia dalam hal ini penitia atau pegawai yang bertugas dalam program.
3. Beberapa upaya yang ditempuh dalam menangani hambatan adalah dengan memberikan pemahaman yang tepat kepada sumber daya pegawai serta orang tua siswa melalui sosialisasi dan juga mengecek persyaratan penerima manfaat program dengan seksama.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, peneliti mencoba mengajukan saran-saran yang kiranya dianggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan antara lain, yaitu:

1. Perlu diadakannya workshop ataupun pelatihan yang ditujukan untuk sumber daya pendamping program Indonesia pintar supaya menambah wawasan dan kecakapan sumber daya pelaksana.
2. Mengkoordinasikan hal-hal terkait pentingnya program Indonesia pintar dengan stakeholder supaya terjadi integrasi yang baik.
3. Melakukan sosialisasi progra dengan baik kepada seluruh penerima manfaat supaya tidak menimbulkan kebingungan-kebingungan bagi orang tua dan juga siswa penerima manfaat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, Sahya. (2019). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Akadun. (2009). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: CV. Alfabeta
- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaaran Kekuasaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT. Buku Seru

Skripsi

- Nugraha, Arya. (2016). *Implementasi Kebijakan Pembuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Pada Kantor Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang*. Sumedang: Universitas Sebelas April Sumedang
- Nuridin, Asrul. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemias dan Pengamen di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanudin Makassar
- Rafiudin, Muhammad. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*. Lebak: Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Internet

http://repository.unsri.ac.id/348/1/RAMA_63201_07011281520187_0001126701_01_front_ref.pdf

https://www.kompasiana.com/ronnyyuliafrezaspd/557ceccd949373796a80ba37/p_ermendikbud-nomor-12-tahun-2015-tentang-program-indonesia-pintar-pip?page=all

<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp>

<http://repository.unsri.ac.id/348/>

<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/688>

<https://www.its.ac.id/news/2019/05/02/menyoal-sistem-pendidikan-di-indonesia/>

<https://id.m.wikipedia.org>

Dokumen

UU No 20 Tahun 2013 pasal 13 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Bersama Antara Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017

